

10-31-2005

Aspek logis dalam pernyataan-pernyataan politik

Y. P. Hayon
Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana>



Part of the [Other Arts and Humanities Commons](#), and the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#)

Recommended Citation

Hayon, Y. P. (2005) "Aspek logis dalam pernyataan-pernyataan politik," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*: Vol. 7: No. 2, Article 9.

DOI: 10.17510/wjhi.v7i2.308

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/vol7/iss2/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Aspek Logis dalam Pernyataan-pernyataan Politik

Y.P. Hayon

ABSTRACT Each political formula in the form of a statement (argument) always has a direct interconnected political purpose relative to an important group. This importance factor becomes basic consideration in the formulation of a political statement in such a manner that it can influence public emotion and feeling producing desired agreement and response from the public. Because a wide segment of society becomes special target, with their different levels of education and understanding, the logical aspects are considered unimportant and subject to elimination. The important thing is how to encourage public emotion and encourage the public to response according to what the politicians want. That is why many political statements are irrational (argumentum ad populum), having no consistency between the premise and the conclusion. Many political statements commit the fallacy of composition, shifting the distributive understanding to collective understanding. This article examines the types of fallacies in political statements by presenting actual cases as illustrations.

KEYWORDS Pernyataan politik, kesesatan berpikir, logis formal, logis etis, kesalahan epistemologis.

Setiap pernyataan politik selalu dilontarkan demi tujuan politis. Tujuan politis itu selalu berkaitan erat dengan kepentingan tertentu, baik kepentingan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, agar tujuan itu tercapai, pernyataan politik harus dikemas sedemikian rupa sehingga mampu merebut emosi dan simpati publik untuk dapat menyetujui, menerima, serta meyakini apa yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang benar sehingga nantinya sikap tertentu sebagaimana yang diinginkan dapat ditunjukkan. Insan politik paham benar akan hal ini. Ini berarti bahwa bahasa politik bukanlah model bahasa yang berciri informatif, melainkan bahasa yang bernuansa ekspresif sekaligus persuasif. Dikatakan *ekspresif* karena dengan dan melalui bahasa politik, seorang politikus berupaya menggugah hati serta perasaan orang banyak untuk dapat menyetujui isi dari pesan politik yang disampaikan. Disebut *persuasif* karena melalui suatu argumen politik, seseorang ingin meyakinkan massa pendengar akan kebenaran dari apa yang disampaikan. Ini semua mengisyaratkan bahwa bobot suatu pernyataan politik akhinya bergantung kepada apa dan bagaimana respons publik terhadap pernyataan politik yang disampaikan.

Dengan kata lain, semakin besar reaksi publik terhadap pernyataan politik tertentu, dan sepanjang reaksi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan, semakin efektif pulalah pernyataan politik itu sendiri. Jadi, yang paling penting bagi sebuah pernyataan politik bukanlah bahwa pernyataan itu tertata dalam suatu alur penalaran yang serba logis, melainkan bahwa pernyataan politik itu memiliki kekuatan untuk membakar emosi pendengar agar menyetujui apa yang disampaikan. Sejauh pendengar menampilkan sikap dan reaksi tertentu seperti yang diinginkan, maksud sang politikus sebagai penyampai argumen politik itu pun tercapai.

Terlepas dari berbagai pertimbangan mengenai faktor muatan dan kepentingan politik yang menjadi latarbelakang, tulisan ini, seperti tampak dari judul, bermaksud untuk menyingkapkan kandungan logis yang terdapat dalam argumen-argumen politik. Dengan berpedoman pada perangkat kaidah-kaidah berpikir, tulisan ini berusaha untuk memperlihatkan kesesatan berpikir yang terselubung dalam rumusan-rumusan politik.

LOGIS FORMAL DAN LOGIS ETIS

Jika kita berbicara tentang aspek logis sebuah pernyataan atau argumen, dengan sendirinya kita harus berbicara tentang logika sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana menyusun jalan pikiran sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir. Sebagai bagian filsafat, logika pada inti pokoknya merupakan studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat (Copi 1976:3). Dengan rumusan ini tidak hendak ditegaskan bahwa seseorang dengan sendirinya mampu berpikir logis jika ia mempelajari kaidah-kaidah logika. Kesesatan-kesesatan berpikir dalam aneka ragam bentuk di mana pun dan kapan pun selalu saja bisa dilakukan oleh manusia dalam berkomunikasi. Bagaimanapun, harus diakui bahwa orang yang dengan tekun mempelajari kaidah-kaidah berpikir setidaknya memiliki peluang lebih besar untuk dapat mengenali tepat tidaknya suatu penalaran, termasuk penalarannya sendiri, tinimbang mereka yang sama sekali tidak berkenalan dengan metode-metode dan prinsip-prinsip penalaran.

Akan halnya suatu pernyataan politik, aspek yang relevan bukan hanya logika, melainkan juga etika. Kedua cabang filsafat ini memang berbeda wilayah pengkajiannya: logika berada dalam wilayah epistemologi, sedangkan etika berada dalam wilayah aksiologi. Namun, dalam upaya menelaah sebuah pernyataan politik, keduanya bersinggungan. Hal ini terjadi karena baik logika maupun etika bertolak dari kegiatan berpikir sebagai dasarnya. Hanya saja, logika membatasi diri pada pengkajian mengenai hubungan antara kegiatan berpikir dan aturan-aturan formal yang melandasinya, sedangkan etika memusatkan perhatiannya pada studi tentang hubungan antara kegiatan berpikir dan tingkah laku seseorang. Dengan demikian, dari suatu argumen dengan premis-premis yang sudah tersusun secara memadai, menurut sudut pandang logika, akan diturunkan

sebuah kesimpulan atau konklusi, sementara dalam perspektif etika, dari premis-premis yang sama itu akan ditarik sebuah konsekuensi. Ini berarti kesimpulan, dalam logika, merupakan hasil logis formal, sedangkan konsekuensi, dalam etika, merupakan hasil logis etis. Dari cara kerja kedua cabang filsafat tersebut terlihat jelas bahwa logika selalu beroperasi pada tataran formal karena mempersoalkan selaras tidaknya aktivitas akal budi dengan kaidah-kaidah berpikir yang mengaturnya, sementara etika senantiasa bermain pada tataran praktis lantaran terus-menerus bergumul dengan pertanyaan apakah suatu argumen tertentu secara konsekuen terwujud dalam perilaku konkret.

KESESATAN FORMAL DAN KESESATAN INFORMAL

Berangkat dari kecenderungan utama sebuah pernyataan politik, yakni agar dapat menggugah perasaan masyarakat luas sehingga bisa menyetujui apa yang disampaikan dan kemudian diharapkan dapat memperlihatkan reaksi serta sikap tertentu seperti yang diinginkan, maka kesesatan logis formal – kesesatan berpikir yang disebabkan pelanggaran terhadap hukum-hukum silogisme – tidak menjadi terlalu penting di sini. Yang lebih relevan dan yang justru merupakan sorotan tulisan ini ialah bahwa pernyataan politik itu, disadari atau tidak, membawa dalam dirinya kesesatan logis informal, yakni kesesatan berpikir yang terjadi baik karena faktor penggunaan bahasa maupun karena tidak adanya hubungan logis antara premis sebagai landasan berpikir dan kesimpulannya atau, dengan kata lain, karena konklusi yang diturunkan tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Jenis kesesatan informal ini dikenal dengan sebutan *kesesatan relevansi* atau istilah teknisnya: *ignoratio elenchi*. Salah satu model *kesesatan relevansi* yang sangat dominan teramati dalam pernyataan-pernyataan politik adalah *argumentum ad populum*. Untuk memahami dengan lebih baik bentuk kesesatan logis, berikut ini saya mencoba menghadirkan sebuah ilustrasi.

Beberapa saat setelah terjadi peristiwa ledakan bom yang mengguncang Bali, 12 Oktober 2002, Ketua Majelis Mujahiddin Indonesia melontarkan pernyataan, “ Amerika Serikat adalah biang keladi dari ledakan bom di Bali.” Pernyataan itu adalah pernyataan politik yang memang sarat dengan nuansa politis. Namun, harus disadari bahwa bersamaan dengan itu pernyataan politik tersebut sarat pula dengan kesesatan logis. Betapa tidak. Tidak ada dasar logis sedikit pun untuk menarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat merupakan biang keladi dengan bertitik tolak dari kenyataan terjadinya peristiwa ledakan bom di Bali. Jika argumen itu disusun kembali dalam suatu model penalaran langsung, bentuknya menjadi demikian.

Peristiwa ledakan bom terjadi di Bali.

Jadi, Amerika Serikat adalah biang keladinya.

Kiranya jelas bahwa kesimpulan itu bukanlah merupakan implikasi logis dari premisnya. Tidak terdapat relevansi apa pun antara kesimpulan dan premisnya. Bolehlah dikatakan bahwa proposisi kesimpulan itu hanya

berupa tudingan yang lahir dari sebuah prasangka dan penafsiran subjektif yang dengan sengaja dilemparkan ke tengah khalayak ramai demi suatu tujuan politis, yakni untuk memperoleh simpati publik agar nantinya memberikan respons tertentu. Memang boleh dibilang, gaung pernyataan itu mempunyai pengaruh cukup besar. Dendam kesumat dan rasa anti-pati terhadap Amerika Serikat yang dipicu oleh pernyataan politik itu tampaknya terus membara dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan dalam bentuk aksi konkret tertentu. Dari perspektif ini, peledakan Hotel Marriott pada 5 Agustus 2003 yang lalu tidak mustahil merupakan salah satu bias dari perasaan dendam itu. Hal itu karena, menurut pengakuan para tersangka yang kini sedang berada dalam tahanan, Amerika Serikat sesungguhnya yang menjadi sasaran utama dari pemboman hotel tersebut.

Bersamaan dengan *argumentum ad populum*, jenis kesesatan berpikir lain yang sangat lazim dilakukan dalam pernyataan-pemnyataan politik adalah *kesesatan karena komposisi*, yakni kesesatan yang dilakukan karena seseorang menganggap bahwa apa yang benar (berlaku) bagi satu atau beberapa individu dalam suatu kelompok tertentu, pasti benar (berlaku) pula bagi keseluruhan kelompok tersebut sebagai satu kesatuan (Hayon 2000:83). Dalam hubungan ini, kasus Osamah bin Laden dipandang tepat untuk diangkat sebagai ilustrasi kedua.

Setahun sebelum terjadinya peristiwa peledakan bom di Bali, tepatnya pada 11 September 2001, dunia disentakkan oleh sebuah tragedi besar berupa pengeboman Menara WTC di New York, Amerika Serikat. Akibatnya sudah diketahui, ratusan orang tak berdosa menjadi korban. Reaksi Amerika Serikat pun sudah terbukti. Merasa wajahnya sebagai pemimpin negara adidaya tercoreng, Presiden G.W. Bush mengerahkan seluruh angkatan bersenjata untuk memburu Osamah bin Laden yang belakangan diketahui sebagai "otak" tragedi yang sangat menyedihkan dan memalukan Amerika Serikat itu. Dengan kedok membasmi terorisme, seluruh kekuatan perang dikerahkan untuk menyerang lokasi-lokasi strategis di Afganistan yang diduga sebagai tempat-tempat persembunyian Osamah bin Laden dan kawan-kawannya. Bagaikan memburu tikus yang tidak diketahui secara persis di mana sarangnya, angkatan perang Amerika Serikat terus membombardir lokasi-lokasi strategis itu dengan tujuan agar Osamah bin Laden pada suatu saat dapat ditangkap. Hasilnya menunjukkan bahwa di kalangan sipil tidak sedikit korban berjatuhan, baik yang luka-luka maupun yang tewas, sementara Osamah bin Laden sendiri tetap tidak tertangkap dan bahkan hingga saat ini masih tetap hidup.

Pada saat suara desingan mesin-mesin perang Amerika Serikat menggemuruh di ladang-ladang tempur Afganistan, sempat terdengar suatu ucapan politik yang berbunyi, "Amerika Serikat berperang melawan umat Islam." Dampak pernyataan politik itu langsung terasa. Di Jakarta sendiri, seperti diketahui, situasi menjadi cukup mencekam. Terbawa oleh luapan emosi yang seakan tidak terbandung, ada sekelompok massa yang bahkan berencana untuk melancarkan aksi balas dendam dengan

melakukan *sweeping* terhadap warga Amerika Serikat yang berdiam di Jakarta. Namun, untunghlah niat itu akhimya batal dilaksanakan karena diredam oleh pendapat segelintir kalangan yang berusaha rnelihat permasalahan yang tengah dihadapi secara lebih arif. Tak urung Presiden Megawati sendiri terpaksa turun tangan untuk turut rnenenangkan suasana. Melalui suatu pendekatan yang sangat pragmatis dan persuasif beliau mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang sedang dilanda emosi, agar tetap rnenahan diri. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa kekuatan pernyataan politik itu rnemang sungguh dahsyat. Pernyataan tersebut rnemang sukses secara politis karena tujuannya tercapai.

Akan tetapi, apakah pernyataan politik tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara logis? Jawabannya *jelas tidak*. Pernyataan itu rnengalami sesat pikir karena *komposisi*. Tanpa perlu mencari tahu siapa atau kelompok mana yang melontarkannya, pernyataan politik itu sama sekali tidak memiliki dasar logis. Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan kesimpulan dari suatu argumen yang ditarik secara keliru. Hal itu karena dengan bertitik tolak pada kenyataan bahwa Amerika Serikat memerangi Osamah bin Laden dan kawan-kawannya, dan itu artinya pernyataan tersebut berbicara tentang sesuatu yang sifatnya distributif individual, tidak dapat diturunkan kesimpulan bahwa Amerika Serikat rnemerangi umat Islam — padahal proposisi kesimpulan ini justru berbicara tentang sesuatu yang sifatnya kolektif general. Singkatnya, penalaran itu terang sesat karena bergerak dari tataran distributif ke tataran kolektif.

Adalah sama sesatnya andaikata, atas dasar kenyataan bahwa Amrozy dan kawan-kawannya (yang adalah teroris) merupakan pelaku-pelaku peledakan bom di Bali, dunia luar membuat pernyataan politik bahwa bangsa Indonesia adalah teroris. Mendengar pernyataan politik seperti itu, siapa pun, sebagai warga Indonesia yang masih memiliki rasa kebangsaan, pasti bereaksi keras. Kita semua pasti tersinggung berat rnendengar pernyataan itu. Akan tetapi, bahwa kita mengutuk keras pernyataan dunia tersebut, hal itu tidak hanya karena dengan ucapan politik itu harkat dan martabat bangsa kita digerogoti, melainkan juga lantaran ucapan itu sendiri jelas-jelas tidak sah dari segi logika. Pernyataan dunia itu sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik secara serampangan dari argumen dengan struktur yang serampangan pula sebagai mana tercermin dari susunan formal berikut ini.

*Amrozy dan kawan-kawannya (orang-orang Indonesia) adalah teroris.
Jadi, bangsa Indonesia adalah teroris.*

Seperti argumen yang dikemukakan dalam kasus Osamah bin Laden di atas, argumen ini pun mengalami sesat pikir yang sama karena premis argumen tersebut menyebutkan sesuatu pada lingkup individual, sedangkan kesimpulannya justru menyatakan sesuatu pada cakupan general. Itu berarti premis dan kesimpulan argumen tersebut masing-masingnya berbicara tentang hal-hal pada tataran yang berlainan. Jadi,

dengan dasar pertimbangan apa pun, dari titik pangkal penalaran yang berbicara tentang sesuatu yang sifatnya distributif, tidak pernah boleh disimpulkan sesuatu yang sifatnya kolektif. Argumen tersebut jelas-jelas tidak logis.

KESALAHAN EPISTEMOLOGIS DAN KESALAHAN ETIS

Setiap pernyataan politik, seperti yang sudah dinyatakan di awal, tidak hanya dikenai kualifikasi logis formal, tetapi juga logis etis. Ini berarti bahwa dari segi tinjauan etika, suatu pernyataan politik tidak hanya boleh dan tidak cukup bergulir pada taraf formal konseptual (logis) saja, melainkan secara konsekuen harus juga diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (etis). Meminjam terminologi Immanuel Kant (1724–1804), dalam diri setiap orang, termasuk para politikus, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda, bersemayamlah hukum moral (*lex moralis*) yang setiap saat, dalam fungsinya sebagai imperatif kategoris, memberikan instruksi kepada seseorang untuk mentransformasikan pernyataan atau argumen yang dikemukakannya dari wilayah teoritis ke wilayah praktis. Dalam fungsinya sebagai imperatif kategoris, hukum moral itu memerintahkan seseorang agar mengimplementasikan apa yang sudah logis formal pada tingkat akali ke dalam perilaku konkret. Perintah yang diberikan itu adalah perintah yang bersifat mutlak. Akan tetapi, sekeras-kerasnya instruksi atau perintah hukum moral itu, jika tidak disahuti oleh orang yang bersangkutan, instruksi tersebut akan tetap tinggal instruksi. Perintah moral tanpa respons hanya akan meninggalkan gaung tanpa jejak. Ini semua berarti bahwa persoalan apakah pada kenyataannya instruksi moral tersebut dipatuhi atau tidak, akhirnya terpulang kepada pribadi orang yang bersangkutan. Di sinilah letak tanggung jawab moral seseorang. Jadi, tolak ukur yang digunakan untuk menilai tanggung jawab moral seseorang adalah seperti apa dan bagaimana respons yang ia berikan kepada perintah moral tersebut. Dengan demikian, sikap seseorang dalam memberikan respons terhadap perintah moral itulah yang nantinya akan menentukan apakah perilaku orang yang bersangkutan itu secara moral baik atau tidak baik.

Ilustrasi ketiga yang juga dinilai cocok untuk ditampilkan di sini dalam hubungan dengan persoalan itu ialah kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang menghebohkan karena melibatkan salah seorang pejabat tinggi negara. Dana tersebut, atas perintah mantan Presiden Habibie saat berkuasa, pada mulanya dicairkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang miskin; jadi sebagai dana bantuan sosial. Sekretariat Negara – dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) – disertai tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kecurigaan kemudian muncul karena, setelah menunggu sekian lama, dana tersebut belum sampai juga ke tangan masyarakat yang membutuhkannya. Namun di sisi lain, ketika ditanyakan tentang nasib dana yang sudah dicairkan itu, pejabat yang berkepentingan dengan macam-macam argumen yang persuasif, menjawab bahwa uang tersebut sudah disalurkan sesuai dengan prosedur

yang berlaku. Akhir dari permainan itu membuktikan bahwa, setelah diterjunkan suatu tim khusus yang bekerja secara intensif untuk menyelidiki kondisi yang sebenarnya di lapangan, dana yang katanya sudah disalurkan itu memang ternyata tidak sampai. Belakangan terdengar sinyalemen bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye Partai Golkar. Terlepas dari persoalan benar atau tidak benarnya sinyalemen itu, satu hal yang sudah jelas ialah bahwa pejabat yang bersangkutan menggelapkan dana Bulog tersebut. Dengan bahasa teknis populer, dia melakukan korupsi.

Apa yang bisa ditarik dari kasus Bulog ini? Kalau saja pada tingkat formal pejabat tersebut sadar sungguh-sungguh bahwa setiap bentuk pencurian adalah perbuatan jahat padahal korupsi termasuk salah satu bentuk pencurian, pada tingkat empiris seharusnya dia tidak melakukan korupsi. Jika dia nekat melakukan korupsi juga – dan memang demikian kenyataannya – hal itu hanya didasari oleh dua kemungkinan sebab. Yang *pertama*, dia melakukan kesalahan epistemologis, artinya dia tidak mengetahui bahwa korupsi itu merupakan suatu bentuk pencurian atau, yang *kedua*, dia melakukan kesalahan etis, artinya walaupun dia sadar sungguh-sungguh bahwa korupsi adalah suatu bentuk pencurian, namun dalam lingkup tindakan kongkret dia tidak mau mewujudkan kesimpulannya sebagai konsekuensi dari pemahamannya itu. Dalam hal itu terlihat bahwa tataran teoretis dan tataran praktis terputus; terdapat suatu jurang pemisah yang dengan sengaja diciptakan demi suatu kepentingan politik. Kedua wilayah itu tidak berhubungan. Itu berarti dari premis-premis yang sudah tersusun secara memadai (*sufficient reasons*) pada tingkat formal, pejabat yang bersangkutan tidak rela mewujudkan kesimpulannya pada tingkat empiris. Dengan demikian, dia berpikir dalam suatu logika yang tidak konsekuen dan karena itu juga tidak selesai. Jadi, persoalan di sini bukanlah bahwa dia tidak bisa atau tidak mampu menarik kesimpulan, melainkan bahwa dia tidak mau dan tidak berani; dia takut mewujudkan konsekuensinya dalam tindakan kongkret.

Menyusul kasus Bulog tersebut, sebagai ilustrasi keempat, ada satu peristiwa lain yang tidak jauh bedanya dan masih segar dalam ingatan kita, yakni peristiwa kecelakaan kereta api di Jawa Tengah yang menelan sejumlah besar korban jiwa. Akibat peristiwa tragis itu seluruh jajaran direksi perkereta-apian menjadi panik dan di atas itu semua, Menteri Perhubungan dibuat bingung. Di tengah keprihatinan mendalam atas terjadinya musibah tersebut, muncul suara-suara dari tengah masyarakat yang mendesak agar menteri yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Logika masyarakat jelas: siapa pun yang melakukan kesalahan, pada akhirnya Menteri Perhubungan lah orang yang paling bertanggungjawab karena di bawah kepemimpinannya peristiwa naas itu terjadi. Kenyataan menunjukkan lain. Desakan masyarakat itu oleh pejabat yang bersangkutan ditangkal dengan argumen-argumen yang sifatnya membenarkan diri dengan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Dalam suatu wawancara televisi, menanggapi pernyataan wartawan yang menyampaikan suara desakan dari masyarakat agar yang

bersangkutan mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban moral, dalam bahasa politis dan melalui pertanyaan yang kental dengan gaya ketimuran, menteri tersebut mengatakan: "Jika Presiden tidak menghendaki saya mundur, bagaimana?" Pertanyaan ini pada dasarnya dapat dirumuskan kembali dalam bentuk sebuah proposisi kategoris yang mencerminkan ketegaran sikapnya, "Saya tidak mau mundur!"

Paralel dengan permasalahan Bulog di atas, dalam kasus ini pun, kalau saja Menteri Perhubungan itu memahami sungguh-sungguh bahwa kesalahan apa pun yang dilakukan staf pada jajaran-jajaran bawahan, apalagi kesalahan-kesalahan fatal yang menyangkut nyawa manusia dan yang merugikan banyak pihak, sepanjang masih berada dalam lingkup kewenangan seorang pemimpin, bagaimanapun juga merupakan kesalahan pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara moral dalam bentuk pengunduran diri, padahal kecelakaan kereta api di Jawa Tengah yang menelan demikian banyak korban jiwa terjadi karena keteledoran yang dilakukan staf pada jajaran yang berada di bawah kewenangan Menteri Perhubungan. Pada pada taraf empiris, selayaknya menteri tersebut harus juga memberikan pertanggungjawaban moral dalam bentuk pengunduran diri. Kalaupun dia tetap tidak mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban moral—dan memang demikian kenyataannya—hal itu dapat disebabkan dua alasan. *Pertama*, dia melakukan kesalahan epistemologis. Artinya, dia tidak mengetahui bahwa tetap bertahan sebagai menteri, sementara justru di bawah kepemimpinannya terjadi kecelakaan kereta api yang memakan banyak korban—yang merupakan suatu sikap yang tercela. *Kedua*, dia melakukan kesalahan etis. Artinya, kendatipun dia sungguh-sungguh memahami bahwa memang dirinyalah yang harus bertanggung jawab meskipun tragedi tersebut merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh staf dari jajaran yang dibawahinya, dia tetap tidak rela memikul konsekuensinya dengan mundur dari jabatan sebagai menteri. Di sini pun terlihat jelas bahwa dia hanya berhenti pada taraf konseptual dengan premis-premis yang sudah tersusun rapi. Dia berpikir dalam suatu logika yang tidak konsekuen dan karenanya juga hanya separuh jalan. Dia menolak dan tidak berani masuk ke dalam kesimpulan karena takut menerima konsekuensinya pada taraf empiris.

KESIMPULAN

Setiap politisi pasti sadar betul bahwa, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, setiap pernyataan politik yang diformulasikan harus juga memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan sehingga kelancaran komunikasi dapat terjamin dan pesan politik yang disampaikan dalam pernyataan-pernyataan itu pun dapat dengan lebih mudah dicerna oleh masyarakat luas. Namun, di samping faktor bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, justru karena pesan politik itu selalu dikemas dalam bentuk pernyataan atau argumen, mau tak mau, peranan logika dan etika tidak dapat begitu saja dikesampingkan.

Disadari atau tidak, pernyataan-pernyataan atau argumen-argumen politik yang dikemukakan, sesungguhnya tak akan pernah luput dari sorotan logika dan etika. Dalam permainan bahasa politik yang diperagakan setiap hari, baik logika maupun etika secara bersama-sama menjalankan peranan sebagai norma-norma regulatif yang, dari segi tinjauannya masing-masing, menilai apakah suatu pernyataan politik itu secara formal dan secara moral sah atau tidak.

Keempat ilustrasi yang diangkat dalam paparan di atas sebetulnya hanya merupakan sebagian kecil dari begitu banyak pernyataan politik yang sampai saat ini kita dengar, yang tidak dapat dan memang tidak perlu direkam semuanya dalam tulisan ini. Keempat ilustrasi tersebut cukup dihadirkan di sini sebagai sampel sekaligus model bagi pernyataan-pernyataan politik sejenis lainnya yang mengalami sesat pikir yang sama.

Ilustrasi pertama dan kedua mengindikasikan bahwa karena pernyataan-pernyataan politik itu senantiasa ditujukan kepada publik atau masyarakat luas, kesesatan berpikir *argumentum ad populum* dengan sendirinya tersangkut di situ sebagai suatu implikasi yang tak terelakkan. Mengapa? Yang disebut *masyarakat luas* itu adalah massa yang memiliki tingkat intelektual dan kemampuan pemahaman berbeda-beda sehingga susunan penalaran yang teratur dan logis lalu tidak dibutuhkan lagi. Yang paling penting adalah bahwa pernyataan politik itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perasaan serta menggugah emosi publik agar memberikan reaksi atau respons tertentu sebagaimana yang diinginkan. Inilah sebenarnya yang merupakan tujuan dari suatu pernyataan politik. Karena itu, tidak perlu heran jika pernyataan politik yang dihadirkan dalam ilustrasi pertama serentak juga mengalami sesat pikir *relevansi*. Jenis kesesatan berpikir ini dicirikan oleh tidak adanya hubungan logis apa pun antara premis dan kesimpulan. Apa yang diturunkan sebagai konklusi sesungguhnya bukanlah merupakan implikasi logis dari premisnya. Dalam kenyataannya, sebagian besar pernyataan politik melakukan kesesatan berpikir ini.

Jika ditelusuri lebih jauh, tidak adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan dalam jenis kesesatan tersebut terjadi karena pernyataan politik yang disampaikan itu pada umumnya berupa tuduhan kepada pihak tertentu, yang lahir sebagai hasil dari prasangka, emosi, perasaan, dan penafsiran yang bersifat subjektif. Dalam pergaulan internasional, khususnya dalam dunia diplomatik, unsur-unsur ini selalu menjadi biang keladi yang mendorong negara tertentu untuk melakukan tuduhan terhadap negara lain dan tuduhan itu tidak jarang berakhir dengan perselisihan atau bahkan dengan peperangan yang sudah barang tentu menelan banyak biaya dan merenggut banyak korban jiwa, padahal semuanya ini terjadi atas dasar suatu kepalsuan logis. Ironis memang, tetapi itulah yang terjadi. Sepanjang pertimbangan politis masih merupakan primadona dan dijadikan barometer bagi pergaulan antannasional, setiap jenis benturan yang memuncak pada peperangan yang *notabene* berakar pada kepalsuan logis tersebut tetap dianggap wajar-wajar saja.

Berlainan dengan pernyataan politik dalam ilustrasi pertama, meskipun sama-sama terjangkit kesesatan berpikir *argumentum ad populum*, pernyataan politik yang diangkat dalam ilustrasi kedua sekaligus memperlihatkan kesesatan berpikir yang bercorak komposisi. Penyebab kesesatan di sini tidak lagi terletak pada kenyataan tidak adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan, melainkan pada pergeseran dari tingkat pengertian yang satu kepada tingkat pengertian yang lain. Selain kesesatan relevansi, kesesatan karena komposisi ini pun banyak dilakukan dalam pernyataan-pernyataan politik. Karena memang tujuan utamanya adalah menggugah emosi dan merebut simpati publik, banyak argumen politik, disengaja atau tidak, bergerak dari premis yang berbincang tentang sesuatu pada tataran individual distributif menuju kesimpulan yang berbicara tentang sesuatu pada lingkup general kolektif.

Bila argumen-argumen politik yang ditampilkan dalam ilustrasi pertama dan kedua banyak menyangkut permasalahan mengenai keabsabannya pada tingkat formal saja, setidaknya dengan kaidah-kaidah, maka argumen-argumen yang diketengahkan dalam ilustrasi ketiga dan keempat justru bersentuhan dengan dua tataran sekaligus: formal dan empiris. Dengan berkaca pada kedua ilustrasi yang disebut belakangan ini terlihat bahwa banyak argumen politik memang harus berhadapan dengan dua norma regulatif secara bersamaan: logika dan etika. Di satu sisi, logika, dengan kaidah-kaidah formalnya mencoba mengkaji apakah argumen politik itu logis formal atau tidak dan itu artinya apakah argumen itu sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir sedangkan di sisi lain, etika, dengan prinsip-prinsip moralnya, siap melakukan justifikasi apakah argumen politik itu logis etis atau tidak dan itu artinya apakah argumen tersebut secara konsekuen diterjemahkan dalam tindakan konkret atau tidak. Dengan kata lain, etika selalu mempertanyakan seberapa jauh implementasi argumen politik itu dalam praksis.

Ini semua membuktikan bahwa, dalam konteks argumen politik, justru karena sama-sama bertolak dari kegiatan berpikir, logika dan etika selalu bersinggungan satu dengan yang lain meskipun yang satu, logika, selalu bekerja pada tataran formal, teoretis, konseptual, sementara yang lainnya, etika, senantiasa beroperasi pada tataran material, praktis, empiris. Dari perspektif ini, logika – dan etika tidak dapat dan tidak mungkin dilepaskan satu dari yang lain. Bahkan dalam arti tertentu dapat dikatakan bahwa etika berada dalam cakupan logika karena berpikir logis dalam etika pada hakikatnya adalah berpikir secara konsekuen. Di sini dan pada titik ini lah logika dan etika berpadu menjadi satu. Kiranya tepat nama yang diberikan oleh Immanuel Kant: etika adalah sebuah *praktische Vernunft*; etika memang sebuah logika praktis.

Seluruh pembicaraan di atas baru akan ada artinya apabila ada sedikit kepedulian dari para politisi sebagai kalangan yang biasa bermain di gelanggang politik terhadap peranan logika dan etika dalam hidup keseharian mereka. Jawaban atas pertanyaan apakah logika dan etika, dalam perspektif politik, masih mempunyai fungsi sebagai norma-norma

regulatif atau tidak, dan walaupun masih mempunyai fungsi, seberapa jauh fungsi itu dijadikan pedoman dalam berpolitik, semuanya terpulang kepada para insan politik yang terbiasa bermain dengan rumusan-rumusan politik. Sebab, seperti sudah berulang kali ditegaskan, selama upaya untuk menguasai emosi dan untuk merebut simpati publik masih menjadi sasaran utama dan karena itu penataan premis dan kesimpulan yang sejalan dengan kaidah-kaidah berpikir dianggap tidak perlu diperhatikan; dan sepanjang sang politikus tetap bergelombang pada wilayah premis tetapi takut masuk ke dalam kesimpulan sebagai konsekuensi pada wilayah praktis, maka sampai kapan pun peranan logika dan etika tetap saja terpinggirkan. Barangkali yang seperti itulah logika politik, tetapi kalau demikian sudah pasti yang diperagakan adalah logika politik yang tidak logis.

Dengan membentangkan kesesatan berpikir dan dengan menyingkap kesalahan etis dalam pernyataan-pernyataan politik sebagaimana terpapar lewat keempat ilustrasi di atas, keinginan untuk menurunkan tulisan ini sebetulnya dilatari oleh semacam kecurigaan: jangan-jangan para politisi hanya pandai berlogika politik, tetapi tidak mau berpolitik dalam garis-garis aturan logika formal; jangan-jangan para insan politik hanya mahir melakukan adu-argumen dengan premis-premis yang serba teratur dan ketat, tetapi tidak berani masuk ke dalam kesimpulan dengan menerima konsekuensinya pada wilayah praktis; jangan-jangan logika dan etika diakui eksistensinya dalam kehidupan politik tidak lebih dari sekedar wacana. Kalau memang demikian cara memainkan pernyataan-pernyataan politik, maka logika dan etika, sebagai norma-norma regulatif, tetap akan kehilangan kekuatannya.

Para politisilah, sebagai orang-orang yang berkepentingan, yang mampu menjawab kecurigaan dan kekhawatiran itu. Para pakar politiklah yang akhirnya juga harus memberikan tanggapan apakah semua kecurigaan dan kekhawatiran yang mempunyai landasan real tersebut memang merupakan akibat logis dari aturan main dalam dunia politik yang sudah tidak dapat diubah ataukah semua perasaan itu harus dilihat sebagai suatu kewajiban yang timbul dari ekses-ekses yang terjadi dalam dunia politik. Bila pilihannya terletak pada yang pertama, kemungkinan untuk diskusi sudah tertutup sama sekali dan ini berarti adagium Machiavellian berlaku di sini, "tujuan menghalalkan cara"; tujuan politis mengizinkan seseorang untuk menggunakan cara apa saja termasuk mengobrak-abrik kaidah-kaidah berpikir dan prinsip-prinsip moral. Akan tetapi, bila jawabannya jatuh pada pilihan kedua, di sini diskusi dan setiap bentuk kompromi masih dapat diupayakan. Secara lebih konkret dapat dirumuskan, jalan terbaik macam apakah yang harus ditempuh oleh para insan politik agar tujuan politis yang menjadi sasaran terakhir tercapai secara memuaskan di satu pihak, dan bersamaan dengan itu, di lain pihak, tetap menghargai prinsip-prinsip berpikir dan kaidah-kaidah moral sebagai norma-norma regulatif dalam menekuni profesi mereka sebagai politikus-politikus profesional semua perbincangan itu pada akhirnya harus dikembalikan kepada satu dasar pertimbangan yang paling dalam, yakni

bahwa bagaimanapun, pemimpin yang sekaligus politikus hanya mungkin diteladani dan dicintai rakyatnya jika dia tidak hanya mahir bermain dengan kata-kata politik tetapi juga secara konsekuen menjabarkannya dalam perilaku konkret. Masyarakat luas membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya hebat berargumentasi pada taraf logis formal, tetapi juga, dengan bimbingan hati-nurani yang berkesadaran moral, berani mewujudkannya dalam praksis, kendati untuk itu dia terpaksa berjalan menentang arus sehingga harus berhadapan dengan risiko apa pun, termasuk kemungkinan kehilangan pamor atau bahkan kehilangan jabatan sekalipun.

DAFTAR ACUAN

- Bertens, K. (2002), *Etika*, Jakarta: Gramedia.
- Copi, Irving M. (1976), *Introduction to Logic*, New York: The Macmillan Company.
- Hayon, Y.P. (2000), *Logika: Prinsip-prinsip Bernalar Tepat, Lurus, dan Teratur*. Jakarta: Penerbit ISTN.
- Kant, Immanuel (1996), *Critique of Practical Reason* (translated by T.K. Abbott), New York: Prometheus Books.
- Kleden, Ignas (28 April 1983),, "Pikiran-pikiran tentang Pendidikan Berpikir", dalam harian *Kompas*.
- Von Magnis, Franz (1979), *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius.